

PEMIKIRAN POLITIK SOEKARNO TENTANG DEMOKRASI TERPIMPIN

Oleh : Gili Argenti dan Dini Sri Istiningdias

FISIP-UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG (UNSIKA)

ABSTRAK

Soekarno salah satu tokoh dari empat pendiri Republik Indonesia, pemikiran politiknya sangat luas, salah satu pemikiran politiknya tentang demokrasi yaitu demokrasi terpimpin menjadi kontroversi, mengingat di masa mudanya, Soekarno di kenal sebagai sosok pemikir politik yang sangat revolusioner, humanis dan progresif di zamannya. Sedangkan, pemikirannya tentang demokrasi terpimpin menempatkan sosoknya sebagai pemimpin yang dinilai otoriter oleh lawan-lawan politiknya. Tulisan ini merupakan studi pemikiran tentang Soekarno, khususnya pemikirannya tentang konsep demokrasi yang dia nilai sebagai konsep politik khas tradisi-budaya Indonesia.

Kata kunci : Soekarno dan Demokrasi

ABSTRACT

Soekarno is one of the leaders of the four founders of the Republic of Indonesia, his political thinking is very broad, one of his political thinking about democracy is guided democracy into controversy, in his youth Soekarno was known as a very revolutionary, humanist and progressive figure of political thinkers of his day. His thoughts on leading democracy put his figure as a leader judged authoritarian by his political opponents. This paper is a study of thought about Soekarno, especially his thinking about the concept of democracy which is considered as a political concept typical of Indonesian cultures.

Key word: Soekarno, democracy

A. PENDAHULUAN

Soekarno merupakan salah satu dari empat pendiri Republik Indonesia menurut versi Majalah Tempo, namanya disejajarkan dengan Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir dan Tan Malaka. Pemikiran Soekarno tentang politik kebangsaan menempatkan dirinya sebagai pemikir besar yang pernah dimiliki bangsa Indonesia.

Dalam tipologi pemikiran politik kebangsaan dirinya ditempatkan sebagai pemikir yang berhaluan nasionalis radikal, sejak muda minatnya terhadap dunia politik sangatlah besar. Sebagai seorang yang aktif dalam dunia politik Soekarno banyak menuangkan gagasan pemikirannya dalam bentuk pidato, artikel dan buku. Salah satu pemikiran Soekarno yang sangat kontroversial dan sampai sekarang mengundang polemik ialah pemikiran politik tentang demokrasi terpimpin.

Awalnya pemikiran Soekarno muda dipenuhi oleh idealisme revolusioner dan anti penindasan, tapi diakhir masa kekuasaannya, ia menjelma menjadi sosok pemikir yang represif dan anti demokrasi. Dengan dalih revolusi belum selesai ia mengkonsepkan demokrasi sesuai penafsirannya, bahwa demokrasi yang

dikembangkan oleh dunia Barat (parlemen) tidak sesuai dengan nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia yang terkenal dengan sifat gotong royong dan musyawarah.

Kritik terhadap demokrasi parlemen kemudian memunculkan tesis baru dalam pemikiran Soekarno tentang perlunya memformat ulang konsep demokrasi di Indonesia, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sistem politik yang mesti dibangun haruslah seperangkat nilai yang berakar dalam budaya khas Indonesia, sekilas kita akan menangkap kemiripan dengan pemikiran Tan Malaka yang tertulis dalam "*Madilognya*" tentang budaya asli bangsa pribumi, namun apabila kita kaji lebih dalam lagi keduanya berbeda dalam menafsirkan budaya serta pemikiran politik khas Indonesia.

Soekarno sangat dipengaruhi oleh konstruk budaya Jawa Tradisional, sedangkan Tan Malaka dipengaruhi oleh nilai falsafah budaya Minangkabau serta pengaruh pemikiran rasional Barat tentang pentingnya persatuan diantara kekuatan-kekuatan ideologis yang mengakar di Hindia Belanda saat itu, Tan Malaka memberi contoh persatuan kaum komunis Rusia dan Islam di kaukasus saat revolusi Oktobet 1917(Hary Prabowo, 2002).

Menurut penulis pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin menjadi objek kajian yang sangat menarik untuk diangkat, sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana evolusi pemikiran Soekarno dalam merumuskan arah perjalanan bangsa Indonesia dimasa tuanya, sengaja penulis membatasi pemikiran politik tentang demokarasi terpimpin, karena bila tidak dibatasi objek kajiannya, kita akan sulit *mencover* dan mendalami pemikiran Soekarno pada masa pasca kemerdekaan, karena pemikiran Soekarno tidak saja membahas tentang demokrasi terpimpin, tetapi membahas hampir semua permasalahan sosial politik yang terjadi sejak masa pra dan pasca kemerdekaan.

Berbicara evolusi pemikiran Soekarno kita akan teringat dengan pemikiran Karl Marx, seorang ideolog yang pemikirannya menjadi inspirasi kaum pergerakan Indonesia di masa penjajahan kolonial Belanda.

Para ilmuwan sosial membagi pemikiran Karl Marx menjadi dua tahapan, antara pemikiran Marx muda dan pemikiran Marx tua, pemikiran Marx muda menurut Franz Magnis Suseno, lebih humanistik serta tidak terjebak pada determinisme historis yang senantiasa memikirkan pengembalian manusia dari keterasingan (*alienasi*), ini berbeda dengan pemikiran Marx tua yang sangat "ekonomis", "deterministik" dan anti "naturalisme". (Baskara T. Wardaya, 2003).

Bagitu juga dengan Soekarno, pemikiran masa mudanya sangat progresif dan revolusioner ketika melakukan perlawanan teradap dominasi penjajah kolonialisme Belanda, sedangkan Soekarno tua sangat anti perubahan, pro statusqo dan pendukung kemapanan kekuasaan.

B. SEJARAH HIDUP SOEKARNO

Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901, anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayahnya termasuk golongan bangsawan Jawa seperti ditunjukanya dengan gelar Raden di depan namanya. Garis keluarga Sukemi dikenal sebagai keluarga yang sangat patriotik, nenek dari Sukemi yang statusnya di bawah seorang putri kerajaan merupakan pejuang

perempuan yang gigih melawan Belanda. Konon neneknya ini dikenal sebagai seorang penunggang kuda yang sangat berani pada saat meletusnya Perang Diponegoro. (Nurani Soyomukti, 2008 : 65).

Sukemi lahir pada tahun 1989, ia merupakan tamatan dari Sekolah Pendidikan Guru Pertama yang ada di ibu kota Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur. Setamat dari sekolah guru tersebut, Sukemi bertugas sebagai guru di sebuah sekolah dasar Bumiputra di Singaraja, Bali. Di samping menjalankan tugasnya sebagai guru, ia menambah penghasilannya sebagai asisten peneliti Profesor Van Der Tuuk seorang ahli bahasa yang saat itu sedang mempelajari bahasa dan adat istiadat Bali. (John D Legge, 1972 : 27)

Sedangkan Ibu Soekarno bernama Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari Bali yang merupakan putri dari salah satu keluarga dari kelas Brahmana, salah satu kasta yang sangat terpendang di mata masyarakat Bali. Di Singaraja inilah hubungan cinta keduanya dipertemukan, sebuah hubungan cinta yang penuh dengan rintangan dikemudian hari, karena keduanya berasal dari latar belakang budaya, agama dan suku bangsa yang sama sekali berbeda. Sukemi berasal dari suku Jawa dengan keyakinan Islam, sedangkan Ida Ayu dari suku Bali dengan keyakinan Hindu. (John D Legge, 1972 : 27-28).

Setelah menikah keduanya tetap tinggal di Singaraja sampai lahirnya anak tertua mereka, seorang putri bernama Sukarmini, setelah dirasa cukup umur Sukarmini untuk bisa dibawa pepergian jauh, akhirnya Sukemi mengajukan permohonan pindah tugas mengajar ke Surabaya, permohonan tersebut kemudian dikabulkan, keluarga kecil ini akhirnya pindah ke Surabaya dan disanalah anak kedua mereka yang diberi nama Soekarno dilahirkan.

Soekarno melewati bagian terbesar dari masa kecilnya di Tulung Agung (Kediri) bersama kakeknya, Soekarno kecil sangat menyukai pertunjukan wayang kulit yang berlangsung dari senja sampai dini hari, pada saat di Kediri inilah proses sosialisasi kesadaran politiknya terbentuk. Karena lewat media wayang yang umumnya menceritakan relasi kekuasaan antara pandawa serta kurawa, Soekarno dapat mengenal nilai-nilai kepahlawanan dari kisah para tokoh-tokoh pewayangan yang dilakonkan sang dalang. (Bernhard Dahm, 1987 : 27-33)

Dalam pendidikan formal, Soekarno belajar di Sekolah Rendah Bumiputra, setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ayahnya mengirimkan beliau bersekolah di HBS (*Hoogere Burger School*) di Surabaya. Oleh ayahnya beliau dititipkan kepada seseorang yang kemudian berpengaruh dalam dunia pergerakan nasional yaitu Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto, seorang pemimpin yang karismatik dari Sarekat Islam (SI). Sosoknya ini yang telah membawa Soekarno muda untuk menjelajahi berbagai pemikiran politik dunia seperti nasionalisme, sosialisme dan komunisme.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di HBS Surabaya pada bulan Juni 1921, Soekarno melanjutkan studinya ke Sekolah Teknik Tinggi (*Technische Hoogeschool*) di Kota Bandung sebuah kota yang terkenal dengan kesejukan dan keindahan alamnya, di kota ini Soekarno tinggal di rumah Haji Sanusi yang merupakan kawan lama Cokroaminoto (Bernhard Dahm, 1987: 52).

Di rumah itulah Soekarno jatuh cinta pada Inggit Ganarsih istri dari Haji Sanusi, mengetahui kisah cinta antara istri dengan anak kosnya, akhirnya Haji Sanusi menceraikan istrinya. Akhirnya hubungan asmara antara Soekarno dan

Inggit tidak lagi mengalami hambatan dan hubungan merekapun sampai ke jenjang pernikahan, tentunya setelah Soekarno terlebih dahulu menceraikan Utari istri pertamanya yang merupakan putri dari Cokroaminoto. Pada tahun 1926 Soekarno menyelesaikan studinya dengan meraih gelar Insiyur (Ir), sejarah kemudian mencatat bagaimana Inggit berperan besar dalam masa studi suaminya bahkan banyak memberikan sumbangan moril dan materil untuk Soekarno. (Nurani Soyomukti, 2008 : 76).

Pada tahun yang sama Soekarno menulis artikel yang cukup panjang yang berjudul Nasionalisme, Islam dan Marxisme yang dimuat secara berseri di jurnal Indonesia Muda. Tulisan ini menjadi rujukan utama dikemudian hari oleh para ilmuwan politik ketika mengkaji pemikiran Soekarno dimasa muda, dalam tulisan tersebut sikap anti kolonialisme dan imperialisme tampak jelas ditunjukkan oleh Soekarno. Ia menjelaskan bahwa motivasi utama para kolonialisme Eropa datang ke negara-negara Asia Afrika adalah motif ekonomi untuk menumpuk serta mengakumulasi kapital dengan memeras tenaga dan kekayaan alam dinegeri-negeri yang mereka kuasai.

Dengan adanya penguasaan atas kekayaan alam oleh Negara Eropa khususnya Belanda, Soekarno menyerukan perlawanan untuk mengakhiri penindasan dan penghisapan atas kaum pribumi. Perlawanan yang harus ditempuh menurutnya haruslah dengan jalan non kooperasi dan persatuan dikalangan kaum pergerakan yang tersebar pada tiga aliran kekuatan politik yang besar : Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Soekarno menganjurkan adanya kerjasama diantara ketiganya demi terciptanya kemerdekaan bangsa Indonesia. (Baskara T Wardaya, 2006 : 37-50) . Ide persatuannya ini sebenarnya bukanlah ide *orisinil* dari seorang Soekarno, jauh sebelumnya tahun 1923 tokoh Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda, Mohammad Hatta sudah mengumandangkan pentingnya persatuan dan satu front bersama. (MajalahTempo, 2010: 5).

Selain dilatarbelakangi oleh semangat nasionalisme dan persatuan, keinginan Soekarno mempersatukan Nasionalisme, Islam dan Marxisme sebagai tiga kekuatan politik melawan imperialisme, sebenarnya dipengaruhi oleh konsep kekuasaan Jawa Tradisional. Dalam konsep kekuasaan Jawa Tradisional dikenal konsep kerukunan, sebuah konsep yang mengandung makna untuk berusaha terus menerus bersikap tenang antara satu sama lain, menghilangkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat dan berusaha menyingkirkan unsur-unsur yang menimbulkan perselisihan dan keresahan. (Franz Magnis Suseno, 1984). Konsep filosofis etika Jawa ini memprioritaskan persamaan diatas perbedaan, bagi Soekarno persatuan menjadi keniscayaan sejarah untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Karena menurutnya, ketiga ideologi tersebut sama-sama anti eksploitasi serta memiliki akar sejarah yang sama.

Pada tanggal 4 Juli 1927, dengan dukungan dari enam orang kawan dari *Algemeene Studieclub*, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI), tujuan PNI adalah mencapai kemerdekaan secara sepenuhnya dengan *non koperasi*, masyarakat sangat antusias menyambut pendirian PNI, terbukti dari rapat-rapat umum yang digelar oleh PNI selalu disesaki oleh ribuan orang. Pidato Soekarno yang berapi-rapi membangkitkan semangat nasionalisme, mengundang kekaguman serta memesihir ribuan para pendengarnya. Tampilnya Soekarno sebagai tokoh pergerakan nasional terkemuka dan kemampuan PNI dalam

melakukan mobilisasi massa, menjadikannya sebagai incaran Pemerintah Hindia Belanda, akibatnya rapat-rapat umum yang digelar PNI dibubarkan pemerintah. Klimaksnya pada tanggal 29 Desember 1929 Soekarno dan beberapa tokoh PNI ditangkap dengan tuduhan merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Akhir Desember 1931 Soekarno dibebaskan dengan sebuah kenyataan pahit, bahwa partai yang dipimpinnya telah mengalami kehancuran, para mantan aktifis PNI yang berada diluar penjara, sebelum pembebasannya telah lama mendirikan Partai Indonesia (Partindo) sebagai pengganti PNI, awalnya Soekarno menolak masuk partai tersebut, tapi kemudian sikapnya ini berubah pada tanggal 28 Juli 1932 ia memutuskan masuk Partindo dan secara bulat langsung ditunjuk sebagai ketua. Partindo dibawah kepemimpinan Soekarno menempuh jalan yang sama dengan PNI sebelumnya, yakni menggunakan taktik non koperasi dengan kekuatan massa rakyat sebagai basis materialnya. Taktik radikal yang dipilihnya membuat ia yakin bahwa bekerjasama dengan Belanda tidak akan mencapai tujuan Indonesia merdeka. Kemerdekaan adalah sebuah ilusi jika kita hanya berkompromi dengan pihak yang membuat kita tidak merdeka. (Nurani Soyomukti, 2008 : 83-91)

Pendirian radikal Soekarno dengan strategi non koperasinya berubah ketika Indonesia dikuasai oleh Jepang, sikap lunak dan kompromis Soekarno pada Jepang ini menjadikan dirinya bersama Mohammad Hatta dikenal sebagai tokoh Kolaborator Jepang oleh kaum pergerakan lain yang konsisten dengan taktik non kooperasinya. Padahal sebenarnya sikap lunak Soekarno dan Hatta ini merupakan sebuah taktik strategi yang sudah disusun serta disepakati bersama antara Sutan Sjahrir, Soekarno dan Hatta. Ketiga tokoh pergerakan ini di suatu malam pada bulan Juli 1942 bertemu untuk melakukan pembagian tugas untuk merepon masuknya Jepang menggantikan Belanda di Indonesia. Malam itu ketiganya bersepakat : Soekarno bersama Mohammad Hatta akan bekerjasama dengan Jepang, sedangkan Sutan Sjahrir akan menyusun kekuatan perlawanan anti fasis di bawah tanah. (Tempo, 2010 : 47).

Setelah Indonesia memproklamlirkan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno diangkat sebagai Presiden, bersama Muhammad Hatta pada saat itu diangkat menjadi wakil Presiden, mereka menjadi dwi tunggal untuk mengemban amanat memimpin Republik Indonesia yang masih muda usianya. Keduanya seakan menjadi *icon* pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki budaya, bahasa dan suku bangsa yang beranekaragam, komposisi antara Jawa dan luar Jawa seakan memperkuat simbolisasi keduanya sebagai representasi heterogenitas masyarakat Indonesia.

C. KONTRUKSI POLITIK DEMOKRASI PARLEMENTER.

Sistem demokrasi parlementer telah dipilih oleh para pendiri republik ini sebagai sistem politik pemerintahan tepat pada tanggal 14 November 1945, setelah sebelumnya sempat menggunakan sistem presidensil yang berumur kurang lebih satu bulan lamanya, peralihan kekuasaan dari tangan presiden ke tangan partai politik ini tidak bisa dilepaskan dari peran Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Kedua tokoh yang berpendidikan Barat ini sangat percaya bahwa sistem

parlementer yang umumnya dipakai negara-negara Barat akan yang cocok diterapkan di Indonesia.

Periode pasca kemerdekaan (demokrasi parlementer) merupakan masa-masa yang paling indah bagi demokrasi di Indonesia. Karena pada masa itu semua institusi demokrasi dapat memainkan fungsinya secara maksimal, partai-partai politik tumbuh bagai cendawan dimusim hujan, dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi, terutama dalam menentukan kepengurusan, pemilihan *platform* dan aktivitas mobilisasi dukungan, media pun berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang sangat efektif (Afan Gaffar, 2006 : 60-61).

Dengan segala penghargaannya terhadap sistem parlementer tersebut, kita juga harus objektif bahwa selama sistem parlementer yang diterapkan di Indonesia pada masa tahun 1945-1949 dan 1950-1959, telah gagal menciptakan kehidupan politik yang stabil serta kodusif, sering terjadinya pergantian kabinet akibat mosi tidak percaya dari parlemen dan berlarut-larutnya pembahasan dasar negara di badan konstituante menjadi bukti kegagalan sistem tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan demokrasi parlementer ketika diterapkan di Indonesia.

Pertama, dominanya politik aliran, sebuah konsekuensi ketika diterapkan sistem parlementer dengan sistem multi partai akan membuat masyarakat Indonesia terfragmentasi kebeberapa aliran politik, pada saat itu di Indonesia terdapat lima aliran politik yang dominan : Nasionalisme, Tradisionalisme, Komunisme, Islamisme dan Sosialisme Demokrat. Masing-masing aliran tersebut memiliki konstituen yang sangat ideologis, terkadang konflik yang terjadi dilingkaran elit berdampak pada kader-kader ditingkat bawah, sehingga konflik horizontal kerap terjadi atas nama fanatisme golongan.

Bahkan bisa menjadi konflik *sentrifugal*, yaitu konflik yang cenderung meluas melewati batas wilayah, akibatnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik. Ditingkat elit pun partai-partai politik sangat sulit disatukan ketika merespon satu isu politik, sehingga kesepakatan politik sangat sulit dicapai diantara mereka. Sehingga koalisi yang dibangun terutama dalam membentuk pemerintahan boleh dikatakan sangat lemah, satu kekuatan politik hampir tidak dapat memberikan kesempatan kekuatan politik lainnya membentuk dan menjalankan roda pemerintahan.

Kedua, basis sosial-ekonomi yang masih sangat lemah, terdapat suatu keyakinan bahwa demokrasi akan berjalan dengan baik apabila ia ditopang oleh kondisi sosial ekonomi yang sangat kuat, saat itu pemerintah Indonesia pendapatan perkapitanya masih sangat lemah demikian juga dengan kemampuan baca tulis, logikanya bagaimana orang-orang dapat berpolitik dengan baik dan penuh tanggungjawab kalau masyarakatnya masih sangat kekurangan dan tradisional. (Afan Gaffar, 2006 : 20-23).

Ketidakstabilan politik pada masa demokrasi parlementer akhirnya menimbulkan kekecewaan pada Presiden Soekarno, ia berpendapat bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia mempunyai konsep sendiri yang berbeda dengan konsep politik dan budaya masyarakat Barat. Sangat tidak relevan menurutnya apabila sistem politik dan budaya masyarakat lain, hendak diterapkan dalam kehidupan sosial politik di Indonesia.

Sikap apriori Soekarno terhadap sistem parlementer menurut penulis tidak murni sebagai *antitesis* sistem politik barat saja, karena dalam sistem parlementer yang menjalankan roda pemerintahan sepenuhnya ada ditangan Perdana Menteri bersama para Menteri Kabinetnya, sedangkan posisi Kepala Negara tidak lebih hanya simbol pemersatu bangsa yang otomatis dia tidak mempunyai kewenangan politik apa-apa. Posisi Soekarno berada pada posisi sebagai kepala negara tersebut, yang hanya bersifat simbolis yang berbeda dengan posisi Perdana Menteri yang menjadi titik sentral segala kebijakan politik pemerintah. Kemudian ini menjadi salah satu alasan Soekarno untuk membubarkan sistem parlementer dan menggantinya dengan sistem presidensial.

Kritik Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer sebenarnya sudah lama di suarakan sebelum Indonesia meraih kemerdekaanya, pada tahun 1930-an Soekarno sudah menyatakan bahwa sistem demokrasi parlementer tidak cocok diterapkan di Indonesia masa datang, baginya hak-hak politik yang dijamin oleh demokrasi parlementer belumlah cukup untuk menjamin kebahagiaan rakyat selama keselamatan ekonomi belum ada, bahkan ia juga menyangsikan hak-hak politik dalam sistem demokrasi parlementer, karena kaum borjuis dengan sendirinya mampu menguasai kursi-kursi di parlemen dengan kemampuan kapital yang ia miliki, sehingga dengan kapital yang melimpah itu kaum borjuis bisa memobilisasi sumber-sumber materil untuk meraih kursi di parlemen, otomatis kata Soekarno parlemen akan menjadi pelindung setiap kepentingan kapitalisme.

Baginya konsep Indonesia tentang demokrasi sangat berbeda dengan barat, Indonesia menurutnya menganut prinsip musyawarah, suatu pertukaran ide-ide diantara kekuatan-kekuatan politik yang mewakili masyarakat, sehingga menghasilkan kata mufakat atau konsensus (Bernhard Dahm, 1987: 246).

Sikap keras Soekarno terhadap sistem parlementer memperlihatkan rasa antipatinya terhadap segala yang berhubungan dengan budaya barat, karena baginya semua itu merupakan bentuk hegemoni barat untuk mempertahankan kolonialisme dan imperialismenya di kawasan Asia Afrika. Pada saat Indonesia merdeka serta menerapkan sistem demokrasi parlementer, Soekarno tidak memperlihatkan sikap penolakannya atau melawan para penganjur sistem demokrasi parlementer tersebut seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir.

Baru pada tahun 1956 Soekarno berani melakukan konfrontasi langsung saat berpidato di depan kongres persatuan guru, dalam pertemuan tersebut Soekarno berorasi menunjukan kebobrokan-kebobrokan sistem demokrasi parlementer yang selama ini ia anggap menjadi sumber utama munculnya krisis politik yang berlarut-larut, ia mengusulkan sistem demokrasi baru yang berasal dari kebudayaan asli Indonesia yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah konsep demokrasi yang menekankan bagaimana peranan seorang pemimpin dalam setiap proses politik yang terjadi di dalam masyarakat, bagi Soekarno konsep “kebebasan”, “persamaan” dan “keadilan” khas barat tidak bisa diterapkan di dalam masyarakat Indonesia.

Pada pidato berikutnya pada tanggal 21 Februari 1957 Soekarno kembali menyerukan pentingnya demokrasi terpimpin sebagai antitesa demokrasi liberal, karena menurut Soekarno budaya oposisi yang dikembangkan dalam sistem parlementer, hanya melakukan kritik sehebat-hebatnya dengan tujuan menumbangkan pemerintah, untuk diganti dengan pemerintahan yang baru yang

berasal dari kalangan oposisi. Bentuk oposisi semacam ini dinilai Soekarno tidaklah sehat, karena hanya mencari kesalahan-kesalahan pemerintah tanpa mempertimbangkan keberhasilannya.

Untuk keluar dari krisis politik yang terjadi selama sebelas tahun lamanya, maka Soekarno menawarkan dua konsepsi sebagai jalan keluar dari jeratan sistem demokrasi barat. Dua konsepsi itu adalah (1) membentuk Dewan Nasional, dewan ini terdiri perwakilan dari seluruh lapisan yang ada di dalam masyarakat termasuk memasukan unsur fungsional dan militer (2) membentuk kabinet gotong royong yang memasukan seluruh kekuasaan-kekuasaan politik yang ada diparlemen. (Herbert Feith dan Lance Castles, 1988 : 63-72).

Selain menghendaki terbentuknya Dewan Nasional dan Kabinet Gotong Royong dalam Konsepsi Presiden, Soekarno menganjurkan masuknya kader-kader Partai Komunis Indonesia (PKI) masuk ke dalam kabinet, Soekarno berpendapat suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi untuk memasukan semua kekuasaan politik ke dalam pemerintah, terlebih lagi menurutnya unsur komunis tersebut memiliki massa pendukung enam juta rakyat dan meraih posisi empat besar pada pemilu 1955 (Pidato Soekarno pada tanggal 21 Febuari 1957).

Dua konsep Soekarno ini kemudian lebih dikenal sebagai Konsepsi Presiden, melalui konsepsi tersebut, kemudian terbentuklah Dewan Nasional yang melibatkan semua partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan, terbentuknya Dewan Nasional mendapat tantangan yang sangat kuat dari PSI dan Masyumi. Para penentang Konsepsi Presiden menyatakan, bahwa pembentukan Dewan Nasional merupakan pelanggaran yang sangat fundamental terhadap konstitusi negara, karena sejatinya lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi negara Indonesia.

Puncak kekecewaan Soekarno pada sistem parlementer ialah mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 atas dukungan pihak militer khususnya angkatan darat, dengan dikeluarkannya dekrit presiden konfigurasi politik Indonesia berubah, moment ini merupakan titik awal munculnya otoritarianisme di Indonesia. Karena dengan kembali ke UUD 1945, kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat dengan titik beratnya pada lembaga kepresidenan (Afan Gaffar, 2006)

D. PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG PARTAI POLITIK

Kehadiran partai politik di negara yang menerapkan sistem demokrasi menjadi salah satu syarat mutlak suatu negara dapat digolongkan sebagai negara modern yang berbeda dengan negara yang menerapkan sistem feodal absolut. Soekarno pada masa mudanya merupakan salah satu tokoh pergerakan yang mengajurkan perlunya kehadiran partai politik sebagai alat memobilisasi massa rakyat untuk melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda, keyakinan politiknya diwujudkan dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927 di Bandung. Partai bergambar kepala banteng tersebut menjadi kendaraan politik Soekarno dalam mensosialisasikan ide-ide nasionalisme radikalnya pada rakyat Indonesia.

Pemikiran Soekarno tentang perlunya kehadiran partai politik membuktikan bahwa dirinya seorang yang memiliki pandangan modern, bahwa sistem kepartaian menjadi suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi modern masa datang. Tetapi sistem kepartaian yang diajukan Soekarno untuk konteks

keIndonesiaan menurutnya haruslah sistem satu partai, bagi Soekarno demokrasi tidak harus diterjemahkan sebagai pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk partai sebanyak-banyaknya.

Kondisi sosial ekonomi bangsa yang baru lahir menjadi alasan mendasar mengapa partai tidak diberi ruang dalam kehidupan politik di Indonesia, bahkan Soekarno merasa langkah yang paling bijak adalah hanya dengan membentuk satu partai negara yang tugas utamanya mewedahi segenap potensi bangsa dalam meteras jalan menuju kemakmuran bersama. (Agung Djojosoekarto dan Tunjung Sulaksono, 2010 : 75-77).

Pemikiran Soekarno tentang sistem kepartaian tunggal ini menurut Frans Magnis Suseno, sangat dipengaruhi oleh pemikiran Lenin yang sukses membawa partai komunis menjadi partai pelopor revolusi di Rusia, menurut Soekarno PNI harus menjadi partai yang memberi kesadaran pada masa Marhaen untuk melakukan aksi massa revolusioner menggulingkan pemerintah Belanda di Indonesia (Franz Magnis Suseno, *Di Seberang Jembatan Emas*. KOMPAS tanggal 1 Juni 2001, Edisi Khusus 100 Tahun Soekarno 1901 – 2001 : 67).

Sikap Soekarno ini bertentangan dengan Hatta dan Sjahrir, bagi mereka berdua hak berpolitik serta partai politik adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam UUD 1945 memberikan hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pada masa demokrasi parlementer kehidupan sosial politik diliputi ketidakpastian dan instabilitas pemerintahan. Situasi tersebut mengundang keperihatinan Soekarno, menurutnya kekacauan politik pemerintahan diakibatkan adanya penyakit kepartaian yang menghinggapi elit-elit politisi baik yang berada di lembaga eksekutif dan legislatif, penyakit kepartaian menurutnya ialah berupa sikap keengganan untuk melakukan rekonsiliasi serta menempatkan persatuan diatas kepentingan kelompok atau golongannya.

Para elit politisi lebih mementingkan kepentingannya masing-masing, sikap oposisi yang merupakan bagian dari kehidupan sistem demokrasi, menjadi alat justifikasi untuk menjatuhkan golongan politik lain dari pemerintahan, sehingga yang muncul kemudian bukan budaya oposisi loyal tapi budaya oposisi yang destruktif. Penyakit kepartaian inilah yang menjadi kritik Soekarno, maka untuk mengakhiri krisis politik saat itu, Soekarno mengajurkan partai-partai politik tersebut untuk di kubur, ajuranya ini menurutnya bukan sebuah cerminan bahwa dirinya seorang yang anti demokrasi dan pendukung sistem otoriter.

Pendapatnya tentang penguburan partai-partai politik, bukan berarti ia dapat disejajarkan dengan para diktaktor yang pernah berkuasa, dalam beberapa kesempatan dirinya mengatakan bahwa Soekarno seorang yang sangat demokratis, tapi demokratisnya Soekarno menurutnya bukan demokratisnya liberalisme yang berasal dari barat. Penguburan partai-partai politik menjadi usulan untuk mengembalikan identitas masyarakat Indonesia yang telah tersekat-sekat ke dalam berbagai aliran ideologi serta partai-partai politik.

Setelah partai-partai dikuburkan menurut ajuran Soekarno, kemudian akan dibicarakan arah pembangunan kehidupan politik selanjutnya, apakah dengan mendirikan satu partai atau bukan partai seperti gerakan massa atau beberapa partai rasional, terpenting bagi Soekarno haruslah mencerminkan persatuan dan

budaya politik khas Indonesia (Pidato Soekarno “Demokrasi Kuburkan Partai-Partai N.V).

E. PERSATUAN NASIONALIS, AGAMA DAN KOMUNIS

Konsep pemikiran Soekarno tentang Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965) bukan pemikiran politik yang muncul tiba-tiba, tapi merupakan sebuah konsep pemikiran yang telah ia rumuskan sejak tahun 1920-an. Pada masa mudanya Soekarno telah memiliki cita-cita besar menggabungkan tiga ideologi yang saat itu sangat berpengaruh dan memiliki akar yang kuat di kalangan kaum pergerakan.

Soekarno muda menuangkan gagasan “utopianya” ke dalam tulisan yang berjudul *Islam, Nasionalisme dan Marxisme* pada tahun 1926, tulisan itu dimuat di *Suluh Indonesia Muda* secara berseri. Dalam tulisanya Soekarno memandang perlunya ketiga ideologi untuk bersatu melawan imperialisme Belanda, karena untuk melawan kaum penjajah diperlukan suatu kekuatan efektif yang menghimpun semua unsur kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat (Soekarno, *Islam, Nasionalisme, Marxisme*, 2000)

Keyakinan sinkretismenya ini tetap Soekarno pertahankan sampai akhir hayatnya, baginya persatuan menjadi suatu yang penting serta menjadi prioritas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan secara terang-terangan di hadapan publik, misalnya pada sebuah pidato Soekarno mengaku bahwa darahnya adalah darah nasakom, pidato yang disampaikan dalam acara pembukaan Kongres Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 16 September 1959 itu, Soekarno secara terbuka mengatakan bahwa dirinya masih memegang ideologi campuran yang menurutnya dapat dipandang aneh oleh orang lain, dari situ kita dapat melihat betapa konsistennya Soekarno pada ajarannya. (Nurani Soyomukti, 2008 : 160-162)

Konsep nasakom menurut Soekarno merupakan sebuah faktor-faktor objektif dari masyarakat Indonesia dan jika ingin mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat harus mempersatukan pemikiran mereka. Sebagai tokoh yang mempunyai obsesi persatuan, cita-cita persatuannya selain berhubungan dengan persatuan-persatuan ideologi yang berkembang, juga manifestasi realitas sosial masyarakat saat itu, dengan adanya pemilahan masyarakat pada tiga golongan sosial antara santri, abangan dan priyayi (Afan Gaffar, 2006 : 126).

Peta sosial masyarakat tersebut, memperlihatkan pemilahan sosial yang bersifat kumulatif dan konsolidatif, karena telah terjadi proses penguatan dalam hal pengelompokan sosial terutama di Pulau Jawa. Orang-orang abangan serta priyayi memiliki orientasi politik dan ekonomi yang berbeda dengan orang-orang santri. Kaum abangan dan priyayi ini cenderung memilih untuk berpihak kepada partai politik yang tradisional, sekular dan nasionalistik. Sementara orang-orang santri cenderung memilih untuk berpihak pada partai-partai Islam. Secara historis masyarakat Jawa dibentuk untuk berdiri di dua kaki, tradisionalisme-feodalisme yang lahir dari fase sejarah masyarakatnya sendiri dan modernisme-rasionalistik yang dicangkokkan oleh penjajah kolonial.

Jadi, sekali lagi, pribadi masyarakat Jawa pada dasarnya terbelah, karena separoh feodal (kuno), di sisi lainnya modern. Karena itu, masyarakat Jawa tidak

bisa (sulit) diajak untuk berpikir konsisten dan menyeluruh. Dalam banyak hal, mereka masih berpikir seperti zaman feodal. (Nurani Soyomukti, 2008 : 172)

F. KONSEP MARHAENISME.

Marhaenisme merupakan inti dari ajaran Soekarno, pemikiran tentang marhaenisme merupakan originalitas pemikiran politiknya, marhaenisme diambil dari nama seorang petani di Jawa Barat. Perjumpaan dengan *kang* marhaen dikisahkan oleh Soekarno saat ia berjalan-jalan ditengah persawaan di daerah priangan, Soekarno bertemu dengan seorang petani miskin, kemudian dalam pertemuan itu terjadilah dialog di antara keduanya, Soekarno bertanya tentang kepemilikan tanah, bajak, kerbau dan cangkul, marhaen menjawab bahwa alat-alat produksi tersebut dimiliki oleh dirinya sendiri.

Dari dialog tersebut Soekarno menyimpulkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai petani “termiskinkan” secara sistemik, bukan karena relasi antara kaum *proletar* dengan kaum *kapitalis* yang umunya terjadi di negara-negara Eropa atau antara kelas pemilik alat produksi dengan kelas yang tidak mempunyai alat produksi dan hanya memiliki tenaganya saja untuk dijual (Soekarno, *Tentang Marhaen dan Proletar*, 1999).

Kemiskinan rakyat Indonesia menurutnya disebabkan oleh adanya *imperialisme* dari Belanda yang telah melakukan pencurian dan penghisapan kekayaan alam Indonesia. Ajaran marhaenisme sekilas mungkin akan terlihat sama dengan konsep Marxisme yang memperjuangkan kepentingan kaum *poletar* (buruh) di dunia, sebenarnya konsep marhaenisme sedikit berbeda dengan ajaran Marxisme.

Perbedaan diantaranya ialah : *Pertama*, konsep perjuangan kelas *ala* Marxian tidak relevan dengan konteks masyarakat Indonesia saat itu, karena kelas *proletar* yang menjadi pelopor revolusi sosial dalam teori revolusi komunis belum terbentuk di Hindia Belanda, feodalisme masih kental menyelimuti masyarakat. Kemiskinan yang terjadi bukan murni dari kapitalisme, tapi akibat dari penjajahan ratusan tahun, perjuangan kelas harus digantikan dengan perjuangan kemerdekaan.

Kedua, dalam marhaenisme Soekarno menyingkirkan peran monopoli kelas *proletar* untuk digantikan oleh kaum marhaen.

Marhaen adalah kaum miskin Indonesia, yang berbeda dengan *proletar*, marhaen masih memiliki alat-alat produksi, walau sekala kecil. Marhaen tidak menjual tenaga kepada majikanya, ia memiliki alat-alat produksi sendiri, tapi marhaen tetap miskin. Menurut Soekarno, marhaenisme menolak setiap tindak borjuis yang merupakan sumber dari kepincangan yang ada dalam masyarakat. Soekarno berpandangan bahwa orang tidak seharusnya berpandangan rendah terhadap rakyat, bagi Soekarno rakyat merupakan kelompok yang sekarang lemah dan terampas hak-haknya, tetapi nantinya ketika digerakan dalam gelora revolusi, akan mampu mengubah dunia, marhaenisme menunjukkan bahwa Soekarno memiliki pandangan jauh kedepan yang merupakan *antiesis* dari praktek-praktek *imperialisme* yang serakah menguras kekayaan alam Indonesia.

Soekarno menyusun marhaenisme sebagai cara perjuangan untuk melawan kapitalisme dan *imperialisme*, setelah ia menyadari bahwa teori-teori Marxisme

dari barat tidak sesuai dengan negara jajahan seperti Indonesia, yang perekonomiannya belum mencapai tahap kapitalis. (Taufik Adi Susilo, 2008 : 85-87).

Pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin menurut penulis sangat dipengaruhi falsafah kekuasaan Jawa Tradisional, ia menginginkan kekuasaan politik terpusat pada satu pihak saja yaitu pada seorang pemimpin negara, konsep ini umumnya dikenal pada masa kerajaan-kerajaan Hindu Budha pada masa lalu. Maka tidak heran apabila demokrasi terpimpinya Soekarno disimbolisasikan sebagai kelanjutan sistem kerajaan pada zaman feodal, bahkan menurut sejarawan Taufik Abdullah dalam satu artikelnya, ia menulis ada seorang peneliti asing yang menyebut Demokrasi Terpimpin Soekarno sebagai bentuk sistem kerajaan Mataram baru. (Taufik Abdullah, *Dekrit Presiden, Revolusi dan Kepribadian Nasional* Kompas, Edisi Khusus 100 Tahun Soekarno, 1 Juni 2001)

Proses sosialisasi paham kekuasaan Jawa merupakan sosialisasi politik yang pertama kali diterima oleh Soekarno pada masa kecilnya jauh sebelum ia mengenal pemikir-pemikir besar seperti Marx, Hegel, Lenin atau Kemal Pasha, lewat media wayang kulit inilah Soekarno dikenalkan dengan konsep kekuasaan politik yang dikemudian hari sangat mempengaruhi pemikiran politiknya baik pada masa pergerakan, revolusi fisik dan demokrasi terpimpin.

Dunia wayang sangatlah mempengaruhi Soekarno, tokoh Bima menjadi personifikasi dirinya sebagai simbol orang yang kuat dan meledak-ledak, bahkan sampai ia dewasa dan terjun dalam dunia politik, dalam setiap artikel yang Soekarno tulis kerap menggunakan nama samaran Bima (Bernhard Dahm, 1987: 31-33). Dua konsep kekuasaan Jawa yaitu konsep kekuasaan politik yang terpusat dan integrasi budaya Jawa (sinkretisme), sangat mempengaruhi pemikiran Soekarno dikemudian hari, dari adanya pengaruh kekuasaan Jawa tersebut lahirlah konsep pemikiran politik demokrasi terpimpin dan nasakom.

Demokrasi terpimpin ialah konsep kekuasaan yang menempatkan semua sumber kekuatan politik terletak pada satu orang yaitu pemimpin negara, sedangkan konsep nasakom ialah konsep mempersatukan tiga ideologi yang sebenarnya memiliki landasan *epistemologi* berbeda, tapi berusaha disatukan sebagai landasan filosofis kebangsaan.

Demokrasi terpimpin yang lahir sebagai antitesa dari kegagalan demokrasi liberal pada akhirnya menjadi sebuah sistem politik yang totaliter, otoriter dan bersifat diktator, begitu juga dengan konsep nasakom yang pada awalnya diciptakan untuk mempersatukan semua kekuatan-kekuatan politik yang ada, menjadi paham yang memaksakan *homogenitas* pemikiran, pihak-pihak yang tidak setuju dengan demokrasi terpimpin dan nasakom akan dijustifikasi sebagai antek-antek *neo imperialisme kolonialisme* dan kontra revolusi.

Menurut penulis pemikiran Soekarno tentang penyatuan seluruh kekuasaan politik Indonesia hampir sama dengan pemikiran Tan Malaka, salah tokoh pergerakan kemerdekaan yang lebih senior dari Soekarno, Hatta maupun Sutan Sjahir, mengajukan konsep yang sama yaitu meniscayaan persatuan antara kalangan Islam dan komunis sebagai lokomotif perubahan sosial radikal di Hindia Belanda saat itu.

Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas bahwa pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin membawa pemerintahan orde lama kearah sistem

yang otoriter dan refresif. Selama penerapan demokrasi terpimpin, Soekarno berhasil tampil sebagai salah satu kekuatan politik dominan yang menggantikan peran hegemoni partai-partai politik di era parlementer. Pemikiran Soekarno tentang konsep politik khas Indonesia sebagai sebuah antitesis liberalisme barat akhirnya terjebak pada sloganistik, tetapi dalam realitas politik konsep khas budaya dan identitas Indonesia tersebut menjelma menjadi sistem yang tidak ramah terhadap perbedaan pandangan politik.

Pemusatan kekuasaan ditanganya menjadikan dirinya menjadi seorang tiran yang memberangus kebebasan berdemokrasi, lembaga-lembaga negara yang tidak sehaluan dengan arah kebijakannya kemudian dibubarkan. Beberapa tokoh politik tidak luput dari represifnya, mereka yang berasal dari Masyumi dan PSI, menjadi sasaran kebijakan demokrasi terpimpinya, mereka banyak dijebloskan ke penjara karena sikap politiknya yang bersebrangan dengan yang digariskan oleh penguasa.

Nasakom yang sebelumnya dianggap sebagai *konsep solutif* untuk mempersatukan berbagai ideologi yang ada di Indonesia, ternyata telah gagal menjadikannya sebagai konsep pemikiran yang humanis dan intergralistik, doktrin akan pentingnya persatuan akhirnya hanya menjadi instrumen politik efektif untuk memberangus sikap kritis yang bersebrangan dengan pemerintah.

Persatuan yang dislogankan melalui beberapa media propaganda ternyata hanya mampu mempersatukan elemen-elemen politik ditingkat permukaan saja, terbukti setelah pecah tragedi 30 September 1965 persatuan yang selama ini dipropagandakan pemerintah tidak mampu mencegah pembantaian terhadap jutaan orang-orang yang dituduh komunis. Konsep integralistik beberapa aliran ideologi yang dirumuskan oleh Soekarno terbukti telah gagal mempersatukan masyarakat Indonesia.

G. KESIMPULAN

Pemikiran politik Soekarno tentang demokrasi terpimpin bila dilihat relevansinya dengan konteks Indonesia saat ini dimana gelombang demokratisasi sudah menjadi sistem politik yang mapan eksistensinya dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, merupakan suatu kekeliruan besar bila direlevansikan dalam konteks kekinian, sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem politik yang cenderung otoriter dan refresif. Sangat jauh berbeda dengan situasi Indonesia kontemporer sekarang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, *Dekrit Presiden, Revolusi dan Kepribadian Nasional*. (Kompas, Edisi Khusus 100 Tahun Soekarno, 1 Juni 2001).
- Dahm, Bernhard, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Feith, Herbert dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. (Jakarta: LP3ES, 1988).
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Legge, John D, *Sukarno Sebuah Biografi Politik*, (Jakarta : Sinar Harpan, 1972).

- Soyomukti, Nurani, *Soekarno dan Nasakom*, (Yogyakarta : Garasi, 2008).
Soe Hok Gie, *Catatan Harian Sang Demostran* (Jakarta: LP3ES, 1990)
Soekarno, *Islam, Nasionalisme, Marxisme*. (Yogyakarta : Pustaka Kendi, 2000)
Pidato Soekarno “Demokrasi Kuburkan Partai-Partai N.V
Pidato Soekarno pada tanggal 21 Febuari 1957.
Seri Buku Tempo, *Sjahir Peran Besar Bung Kecil*. (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia KPG, 2010).
Seri Buku Tempo, *Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia*. (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia KPG, 2010).
Suseno, Franz Magnis, *Etika Jawa : Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 1984)
Wardaya, Baskara T SJ, *Bung Karno Menggugat : Dari Marhen, CIA, Pembantaian Massal 65 Hingga G30S* (Yogyakarta : Galang Press, 2006).